



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

SKRIPSI



**RIYAWATI
07 140 035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3322/PK IV/ 05/ 2011

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

DI PENGADILAN NEGERI SOLOK

Disusun Oleh:

Riyawati
07 140 035

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji Pada Tanggal 05 Mei 2011

Yang bersangkutan Telah Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji, Terdiri Dari:

Dekan

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I

Yoserwan, SH, MH, LLM.
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I

Prof. Dr. Ismaasyah, SH, MH.
NIP. 195910101987021002

Pembimbing II

Nani Mulvati, SH, MCL.
NIP. 198208092005012002

Penguji I

Fadillah Sabri, SH, MH.
NIP. 195901111986031002

Penguji II

Hj. Diana Arma, SH, MH.
NIP. 196304111990012001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DI PENGADILAN NEGERI SOLOK**

(Riyawati, 07 140 035, 68 halaman, Fakultas Hukum Unand, 2011)

ABSTRAK

Perbuatan pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap martabat dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana ini telah diatur baik secara umum dalam KUHP yaitu Pasal 263 sebagai kejahatan pemalsuan surat, maupun secara khusus dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam ketentuan khusus tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dalam formulasinya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah. Kedua, bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pemalsuan ijazah. Ketiga, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian sosiologis dengan pendekatan secara yuridis. Hasil dari penelitian tersebut mencoba menjawab permasalahan antara lain, pertama pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun seringkali sanksi yang telah diputus hakim tidak dapat dijalankan karena adanya masa percobaan serta tidak terdapatnya cukup bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Kedua beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dirasa perlu direvisi karena tidak secara tegas merumuskan beberapa hal mengenai: subjek tindak pidana, kualifikasi tindak pidana, jenis sanksi, perbedaan kejahatan dan pelanggaran, tidak adanya ketentuan khusus mengenai aturan pidana pengganti denda apabila denda tidak dibayar oleh terpidana. Yang ketiga berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan dijadikan sebagai indikator dalam melihat kemampuan berfikir dan ijazah adalah salah satu bukti bahwa seseorang tersebut telah menempuh pendidikan formal, latar belakang ekonomi juga sebagai salah satu alasan untuk memperoleh ijazah palsu, keinginan untuk mendapatkan jabatan publik, jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tanpa harus menjalani pendidikan terlebih dahulu. Adapun saran dalam penelitian ini yang dirumuskan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah adalah perbaikan dari segi formulasi (perumusan), aplikasi (penerapan) maupun eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) oleh para penegak hukum.

**CRIMINAL LIABILITY TO CRIMINAL ACTS AGAINST FRAUD
ASSOCIATED WITH DIPLOMAS BY LAW COUNTERFEITING BASED
ON NUMBER 20 YEAR 2003 REGARDING THE NATIONAL
EDUCATION SYSTEM IN SOLOK DISTRICT COURT**

(Riyawati, 07,140,035, 68 pages, Faculty of Law Unand, 2011)

ABSTRACT

The act of diploma counterfeiting means the kind of act to betray society belief of the diploma legality. Furthermore, it is a kind of humiliation to the dignity of education by the parties or institutions who claim as the legitimate educational unit. Liability for a crime is a punishment to the people who did the crime and who were considered to be responsible for it. According to Indonesian criminal law, criminal liability has been set both generally in KUHP (Code of penal Law) specifically at the Article 263 which tells about the crime of diploma counterfeiting, or more specifically in the provision of Criminal Law in Law No. 20 of 2003 on National Education System. But in the Law No. 20 of 2003, there are still shortcomings in the formulation. Issues to be discussed in this paper, first, how is the crime of criminal liability against diploma counterfeiting. Second, how regulation of Law No. 20 of 2003 on National Education System relating to the diploma counterfeiting. Third, what factors caused the diploma counterfeiting which caused the violation of the provisions of Act No. 20 of 2003 on National Education System. Answering these problems I conducted a sociological study with a juridical approach. The results of these studies try to answer the issues raised, among others, the criminal liability to the perpetrators. The perpetrators can accountable for their act but criminal liability against the sanctions imposed on perpetrators can not be executed because of probation with be not found enough proof for their let fall to criminal act. And the setting of Act No. 20 of 2003 on National Education System needs to be revised because it does not explicitly formulate a few things, there are: the subject of crime, criminal qualification, type of sanction, the difference in crime and abuse, the absence of specific provisions regarding the criminal rules of replacement penalties if the fine is not paid by the convict. Another thing that also discussed the falsification of diplomas which resulted in violations of provisions of Act No. 20 of 2003 on National Education System that is used as an indicator of Education in view of the ability to think and a diploma is one proof that someone has been taking education formal, economic background as well as one of the reasons for obtaining a fake diploma, desire to obtain public office, Shortcut to get the diploma without having to undergo education first. The existence of suggestions in this study are formulated to be taken into consideration for law enforcement in an effort to tackle the crime both in terms of formulation (formulation), applications (application) or execution (execution of a court decision) by law enforcement.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala karunia serta curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI PENGADILAN NEGERI SOLOK”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada kekasih Allah, Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Berkenaan dengan terealisasinya penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan rangkaian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis, sehingga skripsi ini berhasil penulis susun, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., LLM Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakuktas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH dan Ibu Nelwitis SH., MH selaku ketua Bagian dan Sekretaris Hukum Pidana Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Nani Mulyati, SH., MCL selaku Pembimbing II Beliau merupakan pribadi

panutan bagi penulis, yang dengan sabar telah berkenan untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Yang tercinta kedua orang tua ku (Saharrudin & Yurnalis) serta kakak ku (Nova) dan adik-adikku (Riza, Ajib, Tasril, Irma, Wani, Didi, dan Fahri) Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, pengertian, doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya pada penulis sewaktu mengikuti materi perkuliahan.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Solok.
8. Bapak Rustam, SH., selaku Panitera bagian Pidana yang telah memberikan izin melakukan studi terhadap berkas kasus pemalsuan ijazah di bagian arsip Pengadilan Negeri Solok.
9. Bapak Darsono Syarif Rianom, SH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Solok yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pegawai Administrasi Fakultas Hukum.
11. Sahabat-sahabatku, feby, Imel, Sari, Mifta, Harra. Atas kesediaanya menjadi sahabat terbaik yang menemani selama kuliah, dan atas segala dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan.

12. Teman-teman PERMAHI: kak Nela, Arif, Meli, Sanul, bg Roni, bg Omar, kak Ipit, bg Sigit, bg Dj, Syarul, Ade, Irsyad, Haris, Mak itam, Lisda, Asti, Lina, kak Rika, Any Arvi, Yosfan, Ridho, Afif, Afifah, Mimi, Nesya,
13. Teman-teman kosan Elit: Icha, Dini, kak Dita, Ega, Yel, Iit, Sarah, Ami, Kak Icha, Tika atas dukungannya.
14. Teman-teman HIMA PIDANA: Anes, Neli, Ibroh, Yuli, Silvi, Lena, Ami, imel, Resi, Andes, Aan, Arvi, Niko, Nofri, Rozi, Yudi, Meldi, Noval, Andre atas dorongan semangatnya.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007: Adit, Ari, Dea, Busro, Lusi, Tata, Liza, Ana, Linda, Nana, Dina, Dini, Rio, Sany, Haris, Wahid, Mul, Greace, Rani, Laili, Frangky, Indah, Siti, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu (khususnya lokal 1).
16. Teman-teman yang telah memberikan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak dimasa sekarang dan dimasa mendatang.

Padang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------|---|
| ABSTRAK..... | i |
|--------------|---|

| | |
|---------------------|----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------|---|
| DAFTAR ISI..... | v |
|-----------------|---|

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..... | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..... | 27 |
| 3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Mengeluarkan Ijazah Palsu..... | 30 |
| 4. Ketentuan Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..... | 34 |

B. Pertanggungjawaban Pidana

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 36 |
| 2. Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana..... | 37 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..... | 45 |
| B. Pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkaitan Dengan Pemalsuan Ijazah..... | 52 |
| C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Ijazah Yang Mengakibatkan Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..... | 62 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial.

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materil, sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia, ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa

yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.¹

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.

Unsur kedua yakni keadilan. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan, karena itu mekanisme bekerjanya hukum dikembangkan sebagai neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Sehubungan dengan keadilan tersebut hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak. Mengingat, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, kekhilafan merupakan sifat insani manusia. Aliran hukum alam meyakini bahwa keadilan itu hanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi manusia juga diberi cacakapan dan juga kemampuan untuk meraba atau merasakan apa yang dinamakan adil. Aliran hukum alam mempercayai bahwa apa

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 21.

yang diamati dalam segala kejadian alam sekitar manusia sudah menumbuhkan dasar-dasar keadilan.

Unsur ketiga yang diharapkan dari hukum adalah kepastian. Lembaga-lembaga hukum seperti hak milik, status perkawinan, dan kontrak, semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban keadilan dan kepastian dalam masyarakat.²

Kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan hukum Negara

Walaupun dapat dibedakan dalam tiga kelompok kepentingan hukum, namun adakalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan kedalam lebih dari satu golongan kepentingan hukum tersebut. Seperti pada kejahatan pemalsuan, perkosaan atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan pada kebenaran objek yang dipalsukan, tidak saja berupa pelanggaran/penyerangan terhadap kepentingan hukum masyarakat tetapi juga terhadap kepentingan hukum Negara.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu

² Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 2.

tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Hal itu pula terjadi pada pemalsuan ijazah yang semakin marak dewasa ini. Ijazah seharusnya diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.⁴ Namun bisa dengan mudah diperoleh oleh yang bukan peserta didik. Dimana biasanya penggunaan ijazah ini untuk memenuhi syarat rekrutmen dari suatu jabatan.

Bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki ijazah, karena putus sekolah atau karena sebab lain akan berupaya memperoleh ijazah. Bagi orang yang ijazahnya hilang tidak ada masalah, karena sepanjang yang bersangkutan benar menempuh jenjang pendidikan tersebut dapat memperoleh pengganti ijazah dari sekolah atau Dinas Pendidikan dan Pengajaran Setempat. Tetapi bagi orang yang tidak menamatkan jenjang pendidikannya dengan benar cenderung akan melakukan manipulasi untuk memperoleh ijazah tersebut. Dari sedemikian banyak manipulasi perolehan dan atau penggunaan ijazah, perolehan dengan jalan pintas paling banyak ditempuh. Anggapan pelaku instansi pendidikan yang memberikan ijazah atau orang yang memperoleh ijazah pada resiko tuntutan pidana atau ancaman batal dari ijazah dimaksud adalah minim dibandingkan dengan perolehan ijazah palsu.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hal. 2.

⁴ Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penggunaan ijazah palsu sebenarnya bukan fenomena baru dalam masyarakat kita. Fenomena ijazah palsu semakin meningkat pada era reformasi. Hal ini terkait dengan kehidupan demokrasi di Indonesia yang semakin baik. Pemilihan umum yang langsung dan bebas membuka sekian banyak posisi politik, baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Dan para calon seakan merasa malu jika hanya bemedalkan ijazah SLTA. Maka ijazah palsu SLTA dan Strata-1 pun laku keras. Komisi pemilihan umum (KPU) kotamadya Solok, baik dipusat maupun di daerah-daerah, menemukan cukup banyak kasus ijazah palsu pada pemilu 2004 maupun pilkada pada tahun 2005. Sayang, hanya satu kasus ijazah palsu yang sampai ke pengadilan.⁵

Hal ini tentu sangat ironis, dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, melalui berbagai program pembangunan, salah satunya melalui jalur pendidikan. Namun segala upaya pemerintah tersebut terganjal akibat adanya pihak-pihak yang bersedia memudahkan orang yang ingin mendapatkan ijazah tanpa perlu mengikuti jalur pendidikan. Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka nantinya jabatan-jabatan penting pemerintahan dapat diisi oleh orang yang tidak berkompeten karena ijazahnya palsu.

Agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka untuk mempertanggungjawabkan sipelaku terhadap perbuatannya dapat diterapkannya Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

⁵ Tjipta Lesmana, *Dugaan Ijazah Palsu Paskah Suzetta*, <<http://www.sinarharapan.co.id>>, tanggal 5 Desember 2009.

Nasional, serta perlunya perbaikan mengenai pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah.

Sebagai peraturan yang lebih khusus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas mengatur tindak pidana pemalsuan ijazah pada Bab XX Ketentuan Pidana. Bila dilihat dari Ketentuan Pidana tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam formulasi pengaturan tindak pidana ini. Hal ini tentu berdampak pada proses penyelesaian tindak pidana dalam prakteknya.

Hukum pidana seharusnya bisa melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pelaku tanpa mengurangi kepentingan perorangan (pelaku) dan masyarakat. Didasarkan atas uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI PENGADILAN NEGERI SOLOK.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran yang melatar belakangi masalah tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan kasus pemalsuan ijazah di kotamadya Solok?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di pengadilan kotamadya Solok?

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di pengadilan kotamadya Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan kasus pemalsuan ijazah di kotamadya Solok.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di kotamadya Solok.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di pengadilan kotamadya Solok.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak yang berkepentingan serta dapat menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Asas Legalitas

Menurut Moeljatno bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Jadi, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*).

b. Asas Kesalahan

Kesalahan dalam artian yang seluas-luasnya bisa dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, didalamnya terkandung makna bisa dicelanya sipelaku atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa

⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 40.

orang yang bersalah melakukan perbuatan pidana berarti orang itu dicela atas perbuatannya.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang atau diancamnya dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁷

Menurut Andi Hamzah dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:⁸

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut Prof. Moeljatno S.H, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum.

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁹

⁷ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 153.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 130.

- a) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b) Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu;
- c) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Menurut D. Simons, mengenai hal pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun dalam hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya dalam hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana¹⁰. Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah pelakunya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan atau tidak pelakunya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Untuk dapat mengenakan pidana terhadap pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 148.

¹⁰ *Ibid*, hal. 152.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi-defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dari kontruksi yang diambil.

a. Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹

Menurut Simon bahwa delik itu adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan terhadap perbuatan, dimana perbuatan manusia tersebut di atas tidak hanya perbuatan aktif saja melainkan juga perbuatan pasif.¹²

b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana¹³

c. Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya,

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 81.

¹² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 45.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, 1980, hal. 75

yang menyerupai dengan aslinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.¹⁴

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Pengaturannya

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ini menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut uu sisdiknas mempunyai strategi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- 2) Pertimbangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 4) Evaluasi, akreditasi, dan sertikasi pendidikan yang memberdayakan;
- 5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

¹⁴ M. Rangga Prihandana, "Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah", Skripsi Fakultas Universitas Bung Hatta, 2010, hal. 3.

- 7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- 9) Pelaksanaan wajib belajar;
- 10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- 11) Pemberdayaan peran masyarakat;
- 12) Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat;
- 13) dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

1. Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
3. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁵

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 29.

mengadakan observasi pada **Pengadilan Negeri Solok** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Masalah

Menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan faktor penyebab serta akibat dari terjadinya pemalsuan ijazah.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data dalam penelitian didapatkan melalui:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber mengenai timbulnya ijazah palsu dan penyebabnya.

b. Jenis Data:

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Data ini di peroleh melalui penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti Pengadilan Negeri Solok dan para pihak yang terlibat.

2) Data sekunder

Data ini diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah.

a) Data Hukum Primer

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b) Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan pemalsuan ijazah.

c) Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama

bahan acuan bidang hukum.¹⁶ Data tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam praktek, penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Solok. Adapun data yang dibutuhkan didapat dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁷ Untuk itu dipelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 33.

¹⁷ Bambang Sunggono. *Op. Cit.* hal. 126.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat, dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.

Setelah terkumpulnya seluruh data dengan lengkap dari lapangan, kemudian melakukan pengolahan dan menganalisis data tersebut. Tahap berikutnya adalah *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut kriteria yang ditetapkan.

b. Analisa data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Di samping itu dikenal dengan beberapa istilah lainnya yang inti pokok permasalahannya juga sama yaitu:¹⁸

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana atau *strafbaarfeit*, maka dalam hal ini dapat dilihat bermacam-macam pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana yaitu:¹⁹

- a. Menurut Simon

Peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁸ Neng Sarmida, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal. 34.

¹⁹ *Ibid*, hal. 35.

b. Vos, mengatakan

Pengertian *strafbaarfeit* merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya diancam dengan undang-undang.

c. Menurut Pompe

Pompe memberikan dua macam definisi mengenai peristiwa pidana yaitu :

1) Yang bersifat teoritis, suatu peristiwa pidana ialah suatu pelanggaran kaidah/pelanggaran tata hukum yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Yang bersifat perundang-undangan/hukum positif

Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.

d. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

e. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

f. Van Hattum

Menyatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapatkan hukuman.

g. Van Hamel, mengatakan

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *Wet* (Undang-undang) yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kasalahan.

Di samping perbuatan pidana ada pula yang diterjemahkan dengan “peristiwa pidana”. Istilah ini dianggap terlampau luas pengertiannya, karena “peristiwa” di sini meliputi keadaan yang timbul bukan sebagai akibat dari perbuatan manusia, misalnya peristiwa gunung berapi, peristiwa banjir yaitu kejadian yang disebabkan oleh alam.

Sedangkan “*feit*” dalam *strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang hanya dilakukan oleh manusia, peristiwa yang disebabkan oleh alam bukan menjadi objek hukum pidana.

Bagi mereka yang menggunakan istilah “peristiwa pidana” memberikan argumentasi memang “peristiwa” mengandung pengertian yang luas, yaitu peristiwa yang dilakukan oleh manusia maupun bukan manusia, akan tetapi bila sudah dikaitkan dengan kata pidana, artinya peristiwa yang dapat dipidana, ini adalah terbatas dengan peristiwa yang dilakukan manusia saja, tidak termasuk peristiwa yang dilakukan oleh bukan manusia.

Sedangkan istilah “perbuatan pidana” mengandung pengertian dalam konsep hukum pidana *Anglo Saxon*, yang memisahkan antara perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pelaku. Dimaksudkan dengan perbuatan pidana adalah sama dengan konsep “*Criminal Act*”, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perundangan hukum pidana, dan perbuatan itu merupakan perbuatan

pidana yang dapat dipidana atau tidak, tergantung dalam “pertanggungjawaban” pidananya.²⁰

Apabila pelaku memang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab, orang yang melakukan perbuatan pidana baru dapat dipidana. Sama seperti dalam konsep hukum pidana *AngloSaxon* yang memisahkan antara “*Criminal Act*” dan “*Criminal Responsibility*”. Pemisahan ini tidak dikenal dalam sistem hukum pidana di Eropa Kontinental, sehingga terdapat perbedaan antara “Perbuatan Pidana” dengan konsep “Tindak Pidana”.

Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, dengan kata lain “perbuatan melanggar hukum”. Perbuatan melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang melanggar hukum yang tertulis contohnya pelanggaran hukum yang tertulis di sini adalah tindak pidana korupsi yang telah diatur oleh suatu undang-undang yang telah diberlakukan.

Berhubungan dengan penjelasan resmi ini, para penulis/Sarjana Hukum Belanda mengadakan penggolongan “Tindak Pidana Berdasarkan Hukum” (*Recht Delicten*) berhadapan dengan “tindak pidana berdasarkan undang-undang” (*Wets Delicten*).

Pertama-tama semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undangnya yang menjadikan pelaku dapat dihukum. Bahwa semua perbuatan itu merupakan “tindak pidana berdasarkan hukum”, jadi semua peraturan hukum

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 1991, hal. 46.

pidana (*strafbepaling*) mempunyai norma yang berada dibidang hukum perdata atau hukum tata Negara. Norma yang dikenal sebelumnya terbentuk suatu undang-undang, dimana penerapan norma itu juga disertai dengan ancaman pidana.

Jadi dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari tindak pidana tersebut yang dikemukakan oleh para ahli yaitu tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah diketahui apa yang dimaksud “tindakan pidana” dan untuk lebih memperjelas pengertian tentang pemalsuan ijazah tersebut maka harus juga diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemalsuan.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata “*faux*” oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni bahwa yang dapat dijadikan obyek dari “*faux*” atau pemalsuan itu hanyalah “*ecritures*” atau tulisan-tulisan saja. Maka, menurut pengertian para pembentuk tetap undang-undang hukum pidana yang berlaku di Negara kita pun dapat menjadi obyek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja.²¹

Menurut hukum Romawi yang dipandang sebagai “*de eigenlijke fasum*” atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya itu adalah pemalsuan surat-surat berharga, pemalsuan mata uang dan baru kemudian ditambah dengan

²¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bandar Maju, Bandung, 1991, hal. 1.

sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin disebut sebagai “*quasi fasum*” atau pemalsuan yang sifatnya semu.

Dengan ditambahkan sejumlah *quasi fasum* di dalam hukum Romawi itulah kemudian orang tidak pernah berusaha untuk membuat perbedaan yang tegas antara tindak pidana pemalsuan dengan tindak pidana yang sifatnya menipu.²² Akibat lain dari ditambahkan *quasi fasum* di dalam hukum Romawi itu juga telah mengakibatkan orang tidak pernah berusaha untuk membuat suatu rumusan yang jelas tentang tindak pidana pemalsuan, yakni untuk dapat membuat suatu garis pemisah antara pengertian pemalsuan dengan tindak pidana-tidak pidana yang lain, terutama dengan tindak pidana penipuan.

Pemalsuan mengenai kebenaran dari suatu tulisan itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, dimana cara yang dipakai orang untuk memalsukan kebenaran dari suatu tulisan tersebut telah mendoktrin mereka membuat perbedaan antara yang disebut dengan pemalsuan intelektual dengan pemalsuan materil.

Keterangan atau pernyataan di dalam suatu tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

²² *Ibid*, hal. 2.

Menurut Van Bemmelen, Van Hattum, pemalsuan secara materil itu hampir selalu dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan. Sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi yang sifatnya menyolok pada pemalsuan secara intelektual itu adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam suatu tulisan.²³

Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan akan kebenaran atas beberapa bukti surat. Perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Norma kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan penipuan.
2. Norma ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara / ketertiban umum.²⁴

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal dalam suatu masyarakat yang telah maju, dimana surat, uang logam, merek, atau tanda tertentu digunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kejahatan penipuan, hingga

²³ *Ibid*, hal. 7.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hal. 32.

tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan seakan-akan benar, sedangkan kebenaran atau keaslian tersebut tidak dimilikinya. Dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan adalah benar atau asli.²⁵

Pemalsuan adalah membuat atau menggandakan suatu surat, dokumen atau suatu akta yang otentik yang menyerupai dengan aslinya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.²⁶ Sedangkan pengertian ijazah menurut UU Sisdiknas pasal 61 ayat (2) adalah tanda atau bukti yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

pemalsuan ijazah adalah membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.²⁷

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

²⁵ Muh. Anwar, *hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 155.

²⁶ Purworejo, *Pelayanan Umum*, <<http://pdkpurworejo.wordpress.com>>, tanggal 10 April 2011.

²⁷ M. Ranga Prihandana, *Op. Cit.* hal. 3.

seseorang yang mana perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan itu dilakukan dengan cara membuat atau menggandakan suatu surat pernyataan resmi, dokumen atau memberikan keterangan palsu mengenai yang sesungguhnya, yang menyerupai dengan aslinya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut.

2. Unsur- unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya enam tahun.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

2) Unsur objektif

Unsur-unsur objektif meliputi:

- a) barang siapa
- b) membuat secara palsu atau memalsukan
- c) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang
- d) suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
- e) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Menurut Prof. Van Hammel, jika dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan

sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.²⁸

Dari pendapat professor Van Hammel tersebut diatas, kiranya orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, hingga untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:

- i. Adanya kehendak pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat
- ii. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 - i) Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau
 - ii) Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan atau kebenaran.
- iii. Adanya maksud pada terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hal. 7.

orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.

- iv. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.²⁹

Yang dimaksud dengan penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kerugian materil saja, melainkan juga dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat.

3. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Mengeluarkan Ijazah Palsu

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi – tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan kepada badan hukum, yakni tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Contohnya adalah pertanggungjawaban korporasi pada tindak

²⁹ *Ibid*, hal. 9.

pidana korupsi (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001).

Tindak pidana pemalsuan ijazah berkaitan erat dengan penyertaan tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mewujudkan suatu delik khususnya delik pemalsuan ijazah pelakunya tidak hanya satu orang. Banyak pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, hukum pidana mengenalnya lebih jauh dengan istilah penyertaan tindak pidana atau *deelneming*.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa erat, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Dengan demikian pokok persoalan dalam ajaran penyertaan, ialah:

- a. Pertama, mengenai *diri orangnya*, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana?

b. Kedua, mengenai *tanggungjawab pidana* yang dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai: apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dari dua jawaban permasalahan tersebut, dapat ditentukan berat ringannya tanggung jawab dari pembuat-pembuat peserta sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana.

Dua masalah pokok pada penyertaan tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan. Jawaban atau pemecahan persoalan yang pertama akan mempengaruhi jawaban atau pemecahan dari persoalan yang kedua.

Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pelaku, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membebaskan tanggung jawab pidana yang lebih besar.³⁰

Sebaliknya menurut ajaran objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang

³⁰ Trisna Delnia Sari, *Hukum Pidana*, <<http://trisnadelniasari.blogspot.com>>, tanggal, 4 April 2011.

menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.³¹

Adapun syarat seseorang dapat dikatakan terlibat atau turut serta dan dapat dipertanggungjawabkan karena secara bersama-sama mewujudkan delik adalah sebagai berikut:³²

- 1) Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:
 - a) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b) Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
- 2) Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Hukum pidana Belanda (WvS) juga KUHP untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam Pasal 55 (*pleger, doen pleger, mede pleger, dan uitlokker*) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*). Jadi untuk orang-orang yang

³¹ *Ibid,*

³² *Ibid,*

masuk ke dalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama.

Tetapi juga menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun pembantu sebelum melaksanakan kejahatan dalam Pasal 56 KUHP beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada Pasal 55 KUHP, yakni beban tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, di mana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Dengan demikian orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan ijazah adalah orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, orang yang menginginkan ijazah palsu lebih dikenal dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Selanjutnya untuk terwujudnya sebuah ijazah palsu tentu ada oknum-oknum dari suatu instansi atau lembaga pendidikan yang terlibat di dalamnya dan ini dikenal dengan istilah (*mede pleger*) orang yang turut serta.

4. Ketentuan Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah secara khusus diatur dalam di dalam Ketentuan Pidana Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional (sisdiknas). Dimana Ketentuan Pidana dalam Undang-undang ini diatur dalam Bab XX mulai dari Pasal 67

sampai dengan Pasal 71. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah, sebagai berikut:

Pasal 67

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Subjek Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.³³

Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.³⁴

³³ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal. 75.

³⁴ *Ibid*, hal. 78.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang didalamnya terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf selanjutnya semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa.

Jadi dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana adalah individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana.

2. Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna jika ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatanya itu.³⁵

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena

³⁵ Neng Sarmida, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, *Op. Cit.* hal. 92.

kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:³⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), maksud berbuat dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan kealpaan diartikan bahwa orang tersebut tidak melakukan penghati-hatian/penduga-dugaan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur kesalahan adalah:³⁷

1) Mampu bertanggungjawab

Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa atau batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi beberapa hal yaitu:³⁸

- a) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

³⁶ *Ibid*, hal. 93.

³⁷ *Ibid*, hal. 94.

³⁸ *Ibid*, hal. 97.

c) Mampu menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kesengajaan (*dolus*) itu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Mengenai pengertian dari kesengajaan itu tidak dirumuskan dalam KUHP. Kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui, yang dimaksud adalah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang dibuat dan harus mengetahui apa yang ia buat itu beserta akibatnya. Mengenai pengertian kesengajaan dalam teori terdapat dua paham yaitu:³⁹

- a) Teori kehendak, teori ini dikemukakan oleh Van Hippel, diterangkan bahwa sengaja atau kehendak melakukan perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
- b) Teori pengetahuan/membayangkan dikemukakan oleh Frank dalam karangannya “ *Vorstellung Und Wille In Der Modernen Dolusluhre* dan *Ueber Den Aufbau Des Schuldbegriffs*, diterangkan bahwa berdasarkan alasan *psikologi*, dimana manusia hanya dapat membayangkan kemungkinan suatu akibat dari perbuatannya.

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Selanjutnya semua unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah;

³⁹ *Ibid*, hal. 101.

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Didalam pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, hal ini disebut peniadaan pidana.

Peniadaan pidana adalah tidak dipidanya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut sumbernya mengenai dasar-dasar peniadaan pidana ada dua macam yakni yang pertama yang berasal dari undang-undang dan yang kedua yang berasal dari luar undang-undang. Dasar peniadaan pidana yang berasal dari undang-undang dibedakan lagi menjadi a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana yang disebut dasar peniadaan umum, b) yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, disebut dengan dasar peniadaan khusus.⁴⁰

Alasan penghapusan pidana tidak tertulis tidak bertentangan dengan alasan legalitas, sebab asas ini hanya mengenyampingkan hukum tidak tertulis dalam hal menetapkan dapat dipidana, tetapi tidak dalam mengurangi atau tidak menghapuskan dapat dipidana. Dalam literatur ilmiah alasan penghapusan pidana lazim dibagi dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 15.

Kalau ada alasan pembeda, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang dasar peniadaan pidana maka perlu diuraikan lebih dahulu tentang dasar peniadaan penuntutan. Antara kedua hal itu terdapat beberapa perbedaan. Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, apabila suatu perbuatan telah lewat waktu (*verjaard*). Dalam hal lewat waktu ini penuntut umum tetap mengadakan penuntutan seadanya.⁴¹

Alasan-alasan penghapusan pidana merupakan petunjuk primer yang tertuju pada hakim. Alasan-alasan tersebut menunjukkan keadaan dalam mana seorang pelaku perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, tidak dipidana. Pembuat undang-undang memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan apakah memang terjadi keadaan khusus yang digambarkan pembuat undang-undang dalam alasan penghapusan pidana tersebut.

- i. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), yang terbagi atas dua golongan yaitu:
 - i) Karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya (tidak dipidana)
 - ii) Jiwa terganggu karena penyakit (hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang terganggu jiwanya itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa).
 - iii) Ketentuan pada ayat dua hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, 1991, hal. 116.

ii. Daya paksa *overmacht* (Pasal 48 KUHP), dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan: “barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Undang-undang tidak menjelaskan apakah itu keadaan memaksa. Jadi diserahkan pada hakim, dan tentu dapat dikembangkan doktrin oleh pakar. Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua,⁴² yang pertama daya paksa yang obsolut/mutlak, biasanya disebut *vis absoluta*. Bentuk ini bukanlah bentuk daya paksa sesungguhnya, karena disini pelaku sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi dia tidak mempunyai pilihan sama sekali.

Van Bemellen menyatakan bahwa daya paksa itu suatu pengertian Normatif. Itu meliputi hal-hal yang seseorang karena ancaman terpaksa melakukan delik. Yang disebut Van Bemellem ini adalah bentuk sebenarnya daya paksa itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*.⁴³

iii. Menjalankan perintah undang-undang (*wederlijk voorschrift*)

Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Dari rumusan yang singkat itu ada beberapa yang perlu diterangkan adalah:⁴⁴

i) Apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang

Pada mulanya ketentuan undang-undang artinya undang-undang dalam arti sempit atau formal belaka seperti dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 27-6-

⁴² Adami Chazawi, *Op. Cit.* hal. 30.

⁴³ *Ibid*, hal. 153.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Bagian 2, Op. Cit.* hal. 55.

1887 yang mengartikan sebagai peraturan yang dibuat raja. Jadi peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.

ii) Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan

Yang dimaksudkan itu ialah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukan adalah berupa suatu tindak pidana.

iii) Tentang apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang-undang

Maksudnya ialah, sebenarnya pasal ini teralalu berlebihan, mengingat bahwa segala apa yang telah diberikan kewenangan atau diperintahkan oleh suatu peraturan perundang-undangan tidaklah mungkin diancam dengan pidana atau berupa tindak pidana menurut ketentuan undang-undang yang lain. Sebetulnya pasal ini dituju untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

iv. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik, Pasal 51 KUHP menyatakan:

- i) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- ii) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali ketika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksana termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah memiliki hubungan hukum publik. Jadi jika yang dimintai pertolongan tersebut itu adalah angkatan bersenjata oleh wali kota dan angkatan itu bukan atasan bawahan secara langsung.

Perintah jabatan yang tidak berwenang lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:⁴⁵

- i) Syarat subjektif, pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang.
- ii) Syarat objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pelaku sebagai bawahan.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 163.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkaitan Dengan Pemalsuan Ijazah

Pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pemalsuan ijazah mengenai Ketentuan Pidana terdapat dalam Bab XX mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 71. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah, sebagai berikut:

Pasal 67

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (3) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan

yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (3) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan perumusan dari beberapa pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana tidak hanya orang secara pribadi tetapi juga organisasi dan penyelenggara pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek tindak pidana pemalsuan ijazah dapat juga berupa korporasi, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam ketentuan pidana dari undang-undang Sisdiknas tersebut. Dari beberapa pasal mengenai ketentuan pidana diatas tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti di kotamadya Solok, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Mengenai Kualifikasi Tindak Pidana

Penegasan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran tidak dirumuskan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal ini bisa menimbulkan masalah karena perundang-undang pidana diluar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pentingnya membedakan “kejahatan dan pelanggaran” dalam buku I KUHP terdapat peraturan yang hanya berlaku terhadap kejahatan dan tidak pada pelanggaran. Kegunaan perbedaan kejahatan terhadap pelanggaran, kita temukan dalam sistematika KUHP yang merupakan buku induk bagi semua perundang-undangan hukum pidana, karena dikaitkan dengan akibat hukum yang penting dan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pada Bab II buku I KUHP yang mengatur tentang pidana dibedakan antara lain:
 - a) Masa percobaan pidana, bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pada umumnya (Pasal 14 b);
 - b) Pada umumnya ancaman bagi kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelanggaran;
- 2) Dalam Bab IV, Buku I KUHP, ditentukan bahwa:
 - a) Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana (Pasal 53);
 - b) Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
- 3) Dalam Bab V Buku I, antara lain:

Membantu untuk melakukan suatu kejahatan dipidana, tetapi untuk pelanggaran tidak (Pasal 56, 60).

4) Kesalahan (*schuld*)

Pada kejahatan selalu ditentukan, atau dapat disimpulkan adanya salah satu bentuk kesalahan, sedangkan pada pelanggaran tidak.

5) Kualifikasi

Hanya dalam kejahatan dikenal adanya kejahatan ringan (pasal-pasal: 302 (1), 352 (1), 364, 379, 384, 407 (1), 482 dan 315 KUHP), sedangkan dalam pelanggaran tidak dikenal.

Berdasarkan riwayat pembentukan KUHP di Belanda dapat diketahui bahwa yang dipakai sebagai dasar untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah dari perbedaan *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kalau seandainya perbuatan ini tidak diatur dalam undang-undang dan tidak dikenakan sanksi pidana, maka perbuatan tersebut dalam pandangan masyarakat tetap dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan patut dilarang. Misalnya: membunuh, menipu, mencuri dan sebagainya.

Sedangkan *wetsdelicten* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dengan hukuman berdasarkan perumusannya dalam undang-undang. Perbuatan ini jika tidak dilarang dengan tegas didalam undang-undang, maka tidak dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan patut dihukum. Misalnya pelanggaran lalu lintas.

Penetapan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan merupakan penetapan kualifikasi yuridis yang mempunyai akibat atau konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis material (yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk menjembatani berlaku aturan umum KUHP. Jadi identik dengan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana ekonomi atau sebagai tindak pidana korupsi yang juga mempunyai akibat yuridis, yaitu:

- 6) Apabila UU diluar UU tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. 1955) menyatakan bahwa suatu delik adalah tindak pidana ekonomi maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam UU Tindak Pidana Ekonomi itu (Pasal 1 sub 3 c UU No. 7 Drt. 1955).
- 7) Apabila UU diluar UU Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) menyebutkan bahwa suatu delik adalah tindak pidana korupsi. Maka berlakulah ketentuan diluar UU korupsi itu (Pasal 14 UU No. 31 tahun 1999).⁴⁶

Demikian pulalah dengan KUHP. Karena aturan umum KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran, maka apabila aturan umum KUHP itu akan juga diberlakukan terhadap UU di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103), maka UU di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 151.

2. Mengenai Subjek Tindak Pidana

Memperhatikan perumusan tindak pidana dalam UU Sisdiknas pada Pasal 67, 68, 69 yang diuraikan diatas, bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana tidak hanya orang secara pribadi, namun juga organisasi dan penyelenggara pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek tindak pidana pemalsuan ijazah dapat juga berupa korporasi, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam perumusan tindak pidana.

Apabila diperhatikan perumusan tindak pidana dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71, maka subjek tindak pidana berupa korporasi hanya ditujukan untuk tindak pidana yang secara tegas menyebutkan bahwa pelakunya adalah organisasi atau penyelenggara pendidikan. Jadi korporasi yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemalsuan ijazah bukanlah semua korporasi, melainkan hanya korporasi yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak.

Apabila organisasi atau penyelenggara pendidikan itu adalah korporasi menjadi masalah siapakah yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana, karena didalam UU Sisdiknas ini tidak ada ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 7/ Drt. Tahun 1955 (Tindak Pidana Ekonomi), Pasal 25 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa.⁴⁷

Seharusnya dimuat suatu ketentuan dalam ketentuan pidana UU sisdiknas ini bahwa tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak dapat dilakukan oleh orang

⁴⁷ *Ibid*, hal. 240.

perorangan atau oleh korporasi. Dimana pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:⁴⁸

- 1) Badan hukum, perseorangan, perkumpulan, atau yayasan
- 2) Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana
- 3) Kedua-duanya.

3. Mengenai Jenis Sanksi

Dalam ketentuan pidana UU Sisdiknas hanya digunakan satu jenis sanksi, yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Tidak adanya kurungan ini mungkin disebabkan semua tindak pidana menurut UU Sisdiknas dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun perlu dicatat bahwa menurut pola yang dianut selama ini (di dalam atau diluar KUHP) bisa saja suatu kejahatan diancam dengan pidana kurungan.

Perumusan ancaman pidana dalam UU tersebut menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif. Hal ini tentu saja bermanfaat demi memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih pidana apa yang cocok. Selain itu akan bersifat *applicable* apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi atau badan hukum.

Apabila korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya juga ada jenis sanksi spesifik berupa tindakan antara lain pencabutan izin usaha, pemberian ganti rugi dan sebagai. Adanya sanksi berupa tindakan *maatregel/treatment* ini

⁴⁸ Sebagaimana Dimuat Dalam Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Bab I, Bagian C 3 Tentang Ketentuan Pidana

dimungkinkan menurut Pasal 21 ayat (5) UU Sisdiknas ini yang menyebutkan dengan istilah sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan, sanksi administratif diatas menurut UU Sisdiknas tidak diintegrasikan kedalam sistem pertanggungjawaban pidana. Artinya sanksi itu tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi atau pertanggungjawaban pidana (misalnya disebut sebagai tindakan atau pidana administratif), sehingga tidak dapat diterapkan oleh hakim, sekiranya pelanggaran terhadap ketentuan UU sisdiknas itu dijadikan sebagai perkara pidana. Melainkan menurut undang-undang tersebut pada Pasal 62 ayat (3) mengenai sanksi administratif berupa penutupan/pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Dengan adanya ketentuan khusus mengenai aturan pidana pengganti denda apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan pelaksana pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yaitu apabila denda tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama enam bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pokok dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana. Unsur pokok dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan (unsur objektif) dan unsur yang tidak kalah pentingnya yakni unsur kesalahan yang dimiliki tiap pelaku (unsur subjektif). Unsur tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya, dimana jika tidak ada salah satu unsur tersebut maka pelaku tidak dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah para pelaku dijerat dengan KUHP. Akan tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pemalsu maupun pengguna ijazah palsu. Ketentuan pidana tersebut tertera pada Bab XX dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69.

Pasal 67. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan
- b. Yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak.

Pasal 68. Adapun unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan

⁴⁹ Chairul Huda, *Op.cit.* hal. 68.

3. Yang tidak memenuhi persyaratan

Pasal 69. Adapun unsur-unsurnya:

- c. Setiap orang
- d. Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi
- e. Yang terbukti palsu

Dengan adanya ketentuan pidana diatas maka ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku pemalsuan ijazah sebagaimana di dalam pasal sebagai berikut yaitu: Pasal 67 hukuman 10 tahun penjara atau denda 1 milyar rupiah, di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 hukuman 5 tahun penjara denda 500 juta rupiah.

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang tersebut diatas, maka di dalam penerapannya dilakukan penelitian terhadap kasus pemalsuan gelar akademik. Dalam kasus pemalsuan gelar akademik yaitu diangkat salah satu kasus yang terjadi di kotamadya Solok:

Kasus yang penulis teliti adalah kasus atas nama terpidana Syaiwat Hamlianggota DPRD kota Solok. Dalam kasus ini terdakwa diduga telah menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Kasus ini berawal dari adanya pemilihan ketua Kadin (kamar dagang dan industri) kota Solok untuk periode 2005-2009 dan terdakwa yang terpilih dan ditunjuk sebagai ketua Kadin kota Solok pada tanggal 3 September tahun 2005. Dimana dalam SK pengangkatan dokumen pelantikan terdakwa sebagai ketua kadin kota Solok tertulis atas nama Syaiwat Hamli, SH dan sebelum pemilihan ketua kadin kota Solok tahun 2005, terdakwa pernah mengatakan kepada anggota kadin kota Solok, diantaranya kepada saksi yazid kasim, BE bahwa gelar SH yang berada dibelakang nama terdakwa dari Universitas Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa menggunakan singkatan SH dibelakang namanya, dimana singkatan tersebut merupakan gelar akademik "Sarjana Hukum". Gelar tersebut digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen selama terdakwa menjadi ketua kadin kota Solok diantaranya sertifikat kompetensi siswa/siswi SMKN 1 Solok dan sertifikat praktek kerja industri (prakerin) Siswa/Siswi SMKN 2 Solok, selain itu terdakwa juga menggunakan gelar SH (Sarjana Hukum) dibelakang nama terdakwa pada Baliho dan juga kartu partai Hanura pada saat terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2009. Namun pada saat terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD yang diumumkan oleh KPU kota Solok ternyata terdakwa tidak memakai gelar sarjana hukum.

Karena Kadin sebagai organisasi tertinggi dari seluruh kantor swasta di kota Solok, maka untuk bisa menjabat menjadi ketua Kadin harus mempunyai nilai plus dan bonafit, baik sebagai pengusaha maupun sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Jadi untuk mendapatkan jabatan itu Syaiwat Hamli dengan

sengaja menuliskan gelar SH dibelakang namanya. Padahal pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA (SMA I Kota Solok lulusan tahun 1988). Namun ketika ditanya mengenai ijazahnya tersebut terdakwa hanya diam dan terdakwa pun tidak bisa menunjukkan ijazah “sarjana hukum” tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Adriyetti, SS. Bahwa cara penulisan gelar akademik adalah dengan cara menulis nama seseorang tersebut dan diakhiri dengan tanda koma (,) kemudian diikuti dengan gelar yang dimiliki oleh orang tersebut, biasanya dengan cara dipendekkan/disingkat, bahwa cara penulisan gelar akademik yang sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 A/U/1987 tanggal 09 September 1987. Bahwa penyingkatan bukan gelar akademik adalah tanpa koma dibelakang nama yang bersangkutan. Bahwa penyingkatan bukan gelar akademik adalah tanpa koma dibelakang nama yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan saksi ahli Adriyetti tersebut, terdakwa telah terbukti menggunakan gelar palsu, dimana terdakwa telah menuliskan gelar akademik dibelakang namanya setelah tanda koma.

Sedangkan menurut keterangan saksi ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH., Bahwa pemakaian gelar akademis mempunyai konsekuensi yaitu bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan sesuai dengan gelar yang disandanginya dan diakhir pembelajaran harus diuji kemampuannya, pemakaian gelar dikatakan bermasalah jika digunakan untuk melakukan sebuah profesi atau perbuatan yang berhubungan dengan gelar tersebut, misalnya gelar sarjana hukum digunakan untuk melakukan tindakan praktek-praktek hukum misalnya menjadi pengacara.

Perbuatan terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Setelah melalui proses persidangan, menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa SYAIWAT HAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan gelar akademik palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar foto copy permohonan pendaftaran anggota kadin nomor: 03/EF/PA/II/2007 tertanggal 19 februari 2007 nama tercantum Sdr. Syaiwat Hamli,SH.
 - b. Satu lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Propinsi Sumatera Barat Nomor: SKEP/009/DP/KSB/IX-2005 tertanggal 3 September 2005 tentang pengangkatan resmi Sdr. Syaiwat Hamli

menjadi ketua kadin kota Solok disana nama tercantum, nama Syaiwat Hamli,SH.

- c. Satu lembar foto copy kata sambutan ketua kadin kota solok Muscab VI Gapensi kota Solok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.
- d. Satu lembar foto copy kata sambutan ketua kadin kota solok Muscab VII akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr.Syaiwat Hamli, SH.Satu lembar foto copy kartu nomor pokok wajib pajak milik Sdr. Syaiwat Hamli.
- e. Satu lembar foto copy pemberian sertifikat kompetensi pada SMK N I kota Solok.
- f. Satu lembar foto copy sertifikat kerja industri (prakerin) pada SMKN 2 Solok.
- g. Satu rangkap foto copy akta notaris pendirian CV. Empat F.
- h. Satu lembar foto copy kartu anggota kadin.
- i. Satu lembar kartu nama partai Hanura an. Syaiwat Hamli, SH.
- j. Satu lembar foto copy surat sosialisasi partai hanura dewan pimpinan cabang no. 004/DPC/-KS/HANURA-u/TV/08 tanggal 17 juni 2008.
- k. Satu rangkap foto copy SK No. SKEP/357/DPP/HANURA/TV 2008, tentang resposisi dan rehabilitasi susunan personalia dewan pimpinan cabang partai hanura kota Solok tanggal 29 April 2009;
- l. Satu rangkap surat permohonan atau pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH.

Kasus tersebut di atas merupakan salah satu contoh tindak pidana pemalsuan ijazah. Namun pada sidang pengadilan yang terbukti hanyalah penggunaan gelar palsu, gelar palsu tersebut digunakan oleh terpidana sebagai salah satu cara untuk mempromosikan diri kepada masyarakat selama menjadi ketua Kadin agar menang pada pemilihan anggota DPRD kota Solok.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ternyata belum pernah menyelesaikan program pendidikan diperguruan tinggi sehingga gelar akademik terdakwa tersebut tidak bisa dibuktikan dengan adanya ijazah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Pada sidang pengadilan terdakwa Syaiwat Hamli hanya terbukti melakukan percobaan dengan menggunakan gelar palsu, dimana gelar yang diduga palsu tersebut merupakan singkatan nama dari terdakwa sendiri yaitu "Syaiwat Hamli" disingkat dengan cara menuliskan "SH" dibelakang nama terdakwa setelah tanda koma, sehingga menjadi "Syaiwat Hamli, SH". Sedangkan khalayak umum mengasumsikan tulisan "SH" dibelakang nama terdakwa tersebut adalah singkatan dari "Sarjana Hukum".

Meskipun dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa SYAIWAT HAMLII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan gelar akademik palsu", serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun, namun pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, karena hakim memerintahkan

pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana belum lewat masa percobaan selama 2 tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Adapun alasan hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa:⁵⁰

1. Terdakwa tidak terbukti memalsukan gelar akademik secara resmi
2. Terdakwa belum pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana.
3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung.

Hal yang menjadi perhatian pada kasus tersebut adalah putusan pengadilan terhadap terdakwa Syaiwat Hamli, bahwa keputusan hakim menjatuhkan hukuman pidana percobaan terhadap terdakwa pada persidangan tersebut kurang tepat. Dimana hakim hanya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam dakwaannya, sedangkan jaksa penuntut umum sendiri tidak bisa membuktikan ijazah atau pun gelar akademik yang dipalsukan oleh terdakwa. Seharusnya hakim dalam memutus kasus ini dapat memberikan sanksi yang lebih berat ataupun sanksi yang lebih meringankan terdakwa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, bahwa undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatukan pidana antara hukuman "minimum dan maksimum" yang diancamkan dalam pasal ketentuan pidana yang bersangkutan. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Darsono Syarif Rianom, SH. Hakim Pengadilan Negeri Solok, Pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2011 Pukul 10.30 WIB.

yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa pada sidang pengadilan tidak terdapatnya cukup bukti untuk menyatakan si terdakwa telah bersalah menggunakan gelar yang diduga palsu tersebut, karena dugaan pemalsuan gelar akademis terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan adanya ijazah yang merupakan bukti otentik yang sifatnya mutlak untuk menunjukan adanya gelar akademis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemakaian gelar akademis (gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademis bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi) dikatakan bermasalah jika digunakan untuk melakukan sebuah profesi (profesi yang berkaitan dengan gelar yang dipakai) serta harus dibuktikan dengan ijazah yang sesuai dengan gelar yang dimaksud, sehingga hakim tidak perlu menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Jadi jika seseorang bermaksud menyingkat nama tetapi khalayak umum mengasumsikan sebagai gelar akademis, maka konsekuensi dari orang tersebut hanya cukup informasi atau penjelasan bahwa singkatan tersebut bukan gelar akademis melainkan sebuah singkatan nama.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Ijazah Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 diatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pendidikan termasuk ijazah dan gelar palsu. Pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah diancam hukuman pidana yang cukup berat yang berupa kurungan penjara atau denda bagi pelanggar seperti pemakai ijazah palsu, lembaga yang mengeluarkan, dan oknum yang terlibat. Hal ini menandakan bahwa gelar akademik adalah sesuatu yang sangat penting. Ijazah dan gelar akademik sebagai bukti kualifikasi pencapaian pendidikan diberikan pada akhir program pendidikan.

Dapat dikatakan bahwa ijazah adalah produk dari suatu proses dan hasil yang dicapai dari program pendidikan dan gelar akademik adalah produk dari proses dan hasil yang dicapai dari program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi. Apabila ada orang yang memiliki ijazah dan atau gelar di luar ketentuan tersebut, misalnya tidak mengikuti proses program pendidikan, tidak mengikuti ujian, atau penyimpangan lainnya dari ketentuan yang berlaku, maka ijazah dan gelarnya perlu dipertanyakan keasliannya. Mungkin ijazahnya palsu atau tidak sah, atau penyebab lain sehingga hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat menilai bahwa gelar akademik itu sangat penting. Banyak pekerjaan atau jabatan yang menuntut persyaratan

kualifikasi tingkat pendidikan tertentu dengan menunjukkan bukti berupa ijazah. Di samping itu dalam budaya sekarang gelar ini masih merupakan satu simbol status seseorang di masyarakat. Andaikan gelar itu tidak penting tentu jumlah perguruan tinggi tidak sebanyak yang ada di negara ini. Dan hampir semua iklan lowongan kerja yang dibuka untuk umum menetapkan gelar atau sertifikasi akademik (kursus dan diploma) sebagai persyaratan.

Lebih-lebih lagi untuk jabatan-jabatan yang berkaitan dengan posisi di pemerintahan. Tetapi tak sedikit dari masyarakat kita yang menilai bahwa gelar akademik itu tidak begitu penting. Pandangan yang demikian muncul bukan disebabkan oleh gelar itu sendiri, namun disebabkan banyaknya orang yang merasa kurang diuntungkan dari gelar akademis yang dimilikinya. Mengenai faktor-faktor penyebab orang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Darsono Syarif Rianom, SH. salah satu Hakim Pengadilan Negeri Solok menjelaskan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu⁵¹:

1. Pendidikan selalu dijadikan sebagai indikator dalam melihat kemampuan berfikir dan ijazah adalah salah satu bukti bahwa seseorang tersebut telah menempuh pendidikan formal.
2. Ekonomi juga sebagai salah satu alasan untuk memperoleh ijazah palsu. Dalam suatu keadaan di mana seseorang mempunyai suatu keadaan ekonomi yang bagus, dan memiliki kesempatan untuk memiliki ijazah palsu maka akan

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Darsono Syarif Rianom, SH. Hakim Pengadilan Negeri Solok, Pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2011 Pukul 10.30 WIB.

tercipta suatu ijazah palsu dikarenakan ijazah tersebut dapat dibeli oleh seorang yang memiliki ekonomi yang lebih baik.

3. Keinginan untuk mendapatkan jabatan publik, bahwa tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh orang-orang yang ingin menduduki jabatan strategis dilatar belakangi adanya faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku itu sendiri maupun dari luar diri pelaku. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindak pidana penggunaan ijazah palsu muncul karena faktor-faktor yang berasal dari pelaku itu sendiri maupun dari luar diri pelaku yang bertitik pangkal dari adanya niat buruk dari pelaku. Upaya jalan pintas yang cenderung menghalalkan segala cara guna meraih kekuasaan politik semata-mata, hampir di setiap pemilu berlangsung penuh dengan proses manipulatif berupa merebaknya *money politic* hingga soal pemakaian ijazah palsu.

4. Jalan Pintas, Dari sedemikian banyak manipulasi perolehan dan atau penggunaan ijazah, perolehan dengan jalan pintaslah yang paling banyak ditempuh. Pelaku atau instansi pendidikan yang memberikan ijazah atau orang yang memperoleh ijazah menganggap resiko tuntutan pidana atau ancaman batal dari ijazah palsu tersebut adalah minim. Dari beberapa modus yang digunakan dalam melakukan perolehan ijazah dengan jalan pintas dapat dikemukakan dua upaya manipulasi.

a. Manipulasi Hasil Akhir, adalah upaya manipulasi yang dilakukan oleh kerjasama antara penyelenggara pendidikan (oknum instansi pendidikan) dengan orang yang memperoleh ijazah. Modusnya adalah mencantumkan nama orang tersebut didalam lembar ujian (Daftar Peserta Ujian) akhir,

yang dulu disebut DPE (Daftar Peserta EBTA/EBTANAS). Ini bisa terjadi dengan memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah dari pengawas sekolah atau pemilik sekolah atau atas kerjasama sekolah dengan pengawas.

- b. Asli Tapi Palsu, apa yang menjadi fenomena ijazah aspal bila dikaji lebih lanjut, betapa masyarakat negeri ini selalu mencari yang instan untuk mendapatkan keuntungan, tanpa memikirkan akan akibat yang akan menyimpannya dikemudian hari. Namun tidak bisa dipungkiri tuntutan akan undang-undang tentu sangat berpengaruh pada perilaku sebagian pendidik yang belum sempat memiliki ijazah PT, apalagi saat ini banyak dari para pendidik di negeri ini belum memenuhi kualifikasi kesarjanaan sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang. Usia yang terkadang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan juga sebagai pemicu untuk mencari jalan pintas, atau jabatan yang dipegang saat ini tidak mau ditinggalkan karena nanti kalau ditinggalkan kuliah belum tentu dapat lagi, itulah sebagian alasan untuk mendapatkan ijazah dengan cepat namun tidak perlu repot-repot.

Dengan memperoleh ijazah secara instan, kualitas pengetahuan pun tidak dianggap penting, karena simbol-simbol pengetahuan telah menjadi komoditas yang diperjual-belikan. Hidup menjadi dangkal saja, kosong nilai. Pada posisi itu, jabatan publik dan kekuasaan dengan mudah tergelincir menjadi kesempatan memperkaya diri. Kepentingan umum dan pengabdian rakyat tetaplah impian yang kosong.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat atau memenuhi unsur delik pemalsuan, sedangkan didalam persidangan kasus tersebut jaksa tidak cukup bukti untuk mendakwakan sipelaku telah menggunakan gelar akademik palsu, namun hakim dalam putusannya tetap saja menyatakan bahwa pelaku tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menggunakan gelar akademik palsu (berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku hanya pidana penjara selama satu tahun serta pidana tersebut tidak harus dijalankan karena belum lewat masa percobaan selama 2 tahun.
2. Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam peraturan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung berbagai ketidakcermatan perumusan antara lain dengan tidak dimuatnya kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut sebagai “kejahatan” atau

“pelanggaran” yang mana perumusan kualifikasi tersebut diperlukan sehubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu pula terdapat permasalahan dalam penentuan subjek tindak pidana korporasi, dimana dalam undang-undang tersebut disebut sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan namun tidak dibuat tentang pertanggungjawaban pidananya. Selain itu berkaitan pula dengan jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi tersebut, yang juga tidak diatur.

3. Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

- a. Pendidikan selalu dijadikan sebagai indikator dalam melihat kemampuan berfikir dan ijazah adalah salah satu bukti bahwa seseorang tersebut telah menempuh pendidikan formal.
- b. Ekonomi juga sebagai salah satu alasan untuk memperoleh ijazah palsu. Dalam suatu keadaan di mana seseorang mempunyai suatu keadaan ekonomi yang bagus, dan memiliki kesempatan untuk memiliki ijazah palsu maka akan tercipta suatu ijazah palsu dikarenakan ijazah tersebut dapat dibeli oleh seorang yang memiliki ekonomi yang lebih baik.
- c. Keinginan untuk mendapatkan jabatan publik dengan cara menempuh jalan pintas yang cenderung menghalalkan segala cara guna meraih kekuasaan politik semata-mata, hampir di setiap pemilu berlangsung penuh dengan proses manipulatif berupa merebaknya *money politic* hingga soal pemakaian ijazah palsu.

d. Jalan pintas untuk mendapatkan ijazah yaitu dengan cara memanipulasi.

B. Saran

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, seharusnya hakim lebih teliti lagi dalam memutuskan suatu perkara pidana, sebab apabila suatu perbuatan pidana yang didakwakan tidak cukup bukti hakim tidak perlu menjatuhkan hukuman pidana percobaan kepada terdakwa.
2. perbaikan formulasi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam peraturan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Dimana perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan perubahan terhadap ketentuan pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dengan mengeluarkan undang-undang khusus tentang tindak pidana pemalsuan ijazah atau sejenisnya.
3. pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerjasama secara aktif untuk mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah. Dimana upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar, sosialisasi dan penyuluhan hukum, perluasan lapangan kerja, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan secara berkelanjutan, baik mengenai kualitas pendidikan maupun izin penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Buku

Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cahirul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Chainur Arrasjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang & theo lamintang, 2009. *Delik-Delik khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, AlatBukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

C. Koran, Majalah, Artikel, Internet

Purworejo, *Pelayanan Umum*, <<http://pdkpurworejo.wordpress.com>>, tanggal 10 April 2011.

Trisna Delnia Sari, *Hukum Pidana*, <<http://trisnadelniasari.blogspot.com>>, tanggal, 4 April 2011.

Tjipta Lesmana, *Dugaan Ijazah Palsu Paskah Suzetta*, <<http://www.sinarharapan.co.id>>, tanggal 5 Desember 2009.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 127 /H.16.4/PP-2011

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 25 Januari 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : Riyawati |
| No. BP | : 07140035 |
| Fakultas | : Hukum Universitas Andalas |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Alamat | : Asrama Putri Unand |
| Untuk Melaksanakan | : PENELITIAN LAPANGAN |
| Waktu | : 3 bulan (26 Januari s/d 26 April 2011) |
| Dalam Rangka | : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi. |
| Judul | : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dikaitkan Dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional |

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PA DANG

REKOMENDASI

No.B.070/164/WAS-BKPL/2011

Tentang Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor: 127/H.16.4/PP-2011 tanggal 25 Januari 2011 Perihal permohonan izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama | : Riyawati |
| Tempat/Tgl Lahir | : K. Talang 20 Desember 1988 |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Alamat | : Kepala Koto (Pauh Padang) |
| No.Kartu Identitas | : 07 140 035 |
| Judul Penelitian | : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dikaitkan Dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| Lokasi Tempat Penelitian | : Kota Solok |
| Waktu Penelitian | : 3 Bulan (26 Januari s/d 26 April 2011) |
| Anggota | |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 8 Februari 2011
AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROP. SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan

ELMANISH
Pembina

NIP. 19570502 198503 1 004

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
3. Sdr. Bupati Solok Cq. Kantor Kesbangpol Dan Linmas di Aro Suka
4. Peringgal

PENGADILAN NEGERI SOLOK

JL. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

TELEPON (0755) 20708 – 20153

Nomor : W3.U7/ 130 /Hkm/II/2011
Lampiran : -
Perihal : Tugas Survey/Penelitian

Solok, 24 Februari 2011

KEPADA :
YTH. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
DI-
PADANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 25 Januari 2011 Nomor: 127/H.16.4/PP-2011 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat ini, maka bersama ini kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya kami tidak keberatan Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : RIYAWATI
No. Pokok Mahasiswa : 07.140035
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan ini kami jelaskan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/ Survey di Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANTERA/ SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK

R. U. S T A M, SH
NIP. 19610413 198402 1001